

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MENJELANG BERAKHIRNYA TAHUN ANGGARAN

Pitriyanti^{1*}, Anis Saggaf¹, dan Abdullah Qiqi Asmara¹

¹ PSPPI, Universitas Sriwijaya, Palembang
Corresponding author: pitriyanti.msc@gmail.com

ABSTRAK: Penyelenggaraan proyek infrastruktur sering kali dihadapkan pada tantangan signifikan menjelang akhir tahun anggaran, yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas proyek. Pada periode akhir tahun, proyek infrastruktur menghadapi tantangan khusus yang memerlukan penanganan yang hati-hati untuk memastikan bahwa semua elemen proyek dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Hal ini termasuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, anggaran digunakan secara efisien, dan hasil akhir memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penanganan akhir tahun ini melibatkan berbagai langkah teknis dan administratif yang harus dilaksanakan dengan cermat, sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, paper ini akan membahas perlakuan proyek infrastruktur pada akhir tahun dengan memberikan penekanan khusus pada berbagai langkah yang perlu diambil. Paper ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur dengan fokus pada tiga aspek utama: biaya, mutu, dan waktu, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai dalam pemeriksaan/audit pada akhir tahun. Fokus utama dari pembahasan ini adalah pada evaluasi progres pekerjaan, pengelolaan anggaran dengan teliti, kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, serta mitigasi risiko yang mungkin timbul. Selain itu, diberikan juga rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan proyek konstruksi ke depan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Langkah Akhir Tahun, Kepatuhan Regulasi, Proyek Infrastruktur Teknik Sipil

***ABSTRACT:** Infrastructure projects often face significant challenges towards the end of the fiscal year, which can impact the success and effectiveness of the project. During the year-end period, infrastructure projects encounter specific challenges that require careful management to ensure that all project elements are completed satisfactorily and in accordance with the plan. This includes ensuring that projects are completed on time, budgets are used efficiently, and final outcomes meet established quality standards. Year-end management involves various technical and administrative steps that must be executed meticulously, in accordance with applicable provisions and regulations. In this context, this paper will discuss the handling of infrastructure projects at the end of the year, with a particular emphasis on the various steps that need to be taken. The paper aims to evaluate the execution of infrastructure projects focusing on three main aspects: cost, quality, and time, based on common issues encountered during year-end audits. The primary focus of this discussion is on assessing work progress, careful budget management, compliance with relevant regulations, and mitigation of potential risks. Additionally, the paper provides recommendations for improving future construction project management, to enhance efficiency, effectiveness, and adherence to established standards.*

***Keywords:** Year End Measures, Regulatory Compliance, Civil Engineering Infrastructure Projects*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan proyek infrastruktur adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Proyek-proyek ini sering kali melibatkan anggaran besar, waktu pelaksanaan yang panjang, dan tuntutan kualitas yang tinggi.

Akhir tahun dalam proyek infrastruktur adalah periode yang sangat penting dan kompleks, karena merupakan

waktu di mana berbagai aspek pengelolaan proyek harus dituntaskan dengan sangat hati-hati. Pada fase ini, proyek infrastruktur menghadapi tantangan khusus yang memerlukan perhatian mendetail untuk memastikan penyelesaian yang sukses, sesuai anggaran, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Dalam konteks ini, peran Insinyur Teknik Sipil menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen proyek dapat

diselesaikan secara efektif dan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Secara praktis, akhir tahun dalam pelaksanaan proyek infrastruktur sering kali diwarnai dengan berbagai kondisi di lapangan yang memerlukan penanganan khusus. Salah satu tantangan utama adalah penyelesaian progres pekerjaan. Pada akhir tahun, kontraktor dan pimpinan proyek harus memastikan bahwa pekerjaan fisik yang tersisa dapat diselesaikan sesuai jadwal. Penundaan atau kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan bisa berdampak signifikan pada anggaran dan jadwal penyelesaian. Kondisi cuaca, masalah pasokan material, dan keterlambatan tenaga kerja sering kali menjadi faktor yang harus diperhitungkan dan dikelola dengan baik.

Pengelolaan Anggaran juga menjadi fokus utama pada akhir tahun. Proses ini mencakup kegiatan audit untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Adanya kemungkinan penyesuaian anggaran atau penyelesaian kontrak yang belum tuntas perlu dikelola dengan teliti agar tidak mengganggu keberlanjutan proyek. Sering kali, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan rencana anggaran dengan perubahan situasi lapangan, seperti penambahan biaya atau pengurangan anggaran.

Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi di lapangan memerlukan perhatian khusus. Setiap dokumen administrasi, izin, dan sertifikat harus diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan yang mungkin baru diterbitkan atau diperbarui selama tahun berjalan harus diperiksa dan diimplementasikan dengan segera.

Mitigasi risiko juga merupakan aspek penting pada akhir tahun. Risiko keterlambatan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada proyek. Identifikasi risiko yang mungkin timbul dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran proyek.

Gillespie, J. (2018) mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen proyek infrastruktur yang perlu diperhatikan selama siklus proyek termasuk pada fase akhir tahun anggaran, antara lain perencanaan yang mendalam, pengelolaan anggaran yang baik, manajemen risiko yang dapat mengurangi dampak negative, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif. Perhatian pada pada manajemen proyek tersebut juga ditujukan untuk menghindari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, seperti kurangnya tata kelola proyek, kesalahan perencanaan awal, manajemen risiko yang tidak tepat, dan tantangan teknologi yang tak terduga yang memengaruhi pelaksanaan proyek (Kostka, 2016). Selain itu, pengendalian berupa perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian waktu proyek (Hadi, S, 2017) perencanaan

anggaran, pengendalian biaya, dan strategi mitigasi risiko biaya (Yohanes, A, 2015) serta teknik dan strategi untuk memastikan mutu proyek sesuai dengan standar yang ditetapkan (Sutrisno, S, 2016) harus diperhatikan bukan hanya menjelang akhir tahun anggaran, namun pada setiap tahapan siklus proyek.

Dengan mengintegrasikan aturan dan regulasi yang relevan serta mengatasi kondisi di lapangan secara efektif, Insinyur Teknik Sipil dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur diakhiri dengan kesuksesan. Pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah teknis dan administratif pada akhir tahun sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dan memenuhi ekspektasi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini berfokus pada kondisi yang ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan atas proyek-proyek ketika mendekati akhir tahun anggaran, dengan fokus pada tiga aspek utama: biaya, mutu, dan waktu. Evaluasi ini didasarkan pada temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama pada pemeriksaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan di tahun 2023 serta studi pustaka terkait yang relevan, beserta hasil wawancara dengan pemangku kepentingan yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Tinjauan literatur dilakukan terhadap bahan Pustaka yang relevan, termasuk peraturan pemerintah, pedoman teknis, dan dokumentasi proyek sebelumnya. Dokumen-dokumen ini akan memberikan dasar pemahaman tentang regulasi dan standar yang berlaku, serta praktik terbaik dalam pengelolaan proyek akhir tahun. Selanjutnya, analisis studi kasus proyek infrastruktur yang telah menyelesaikan akhir tahun dengan sukses serta yang mengalami tantangan akan dilakukan. Analisis ini akan membantu memahami faktor-faktor keberhasilan dan masalah yang mungkin timbul. Penelitian ini juga melibatkan wawancara yang dilakukan dengan profesional yang terlibat dalam proyek infrastruktur, seperti Insinyur Sipil, manajer proyek, dan auditor. Wawancara ini akan memberikan wawasan praktis tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi pada akhir tahun.

Selanjutnya, analisa dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Analisa juga dilakukan terhadap hasil audit kepatuhan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap regulasi yang relevan dengan mengevaluasi dokumen administratif dan penyesuaian terhadap peraturan berlaku. Selanjutnya, potensi risiko yang mungkin timbul akan diidentifikasi

dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan akan menjadi rekomendasi sebagai bahan evaluasi Analisis ini diharapkan akan membantu mengembangkan strategi mitigasi yang lebih baik di masa depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen proyek infrastruktur merupakan aspek krusial dalam pembangunan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proyek infrastruktur sering kali melibatkan anggaran yang besar, waktu pelaksanaan yang panjang, dan standar kualitas yang tinggi. Hasil analisa dan evaluasi atas pelaksanaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada Kementerian PUPR menjelang akhir tahun adalah sebagai berikut.

Regulasi dan Ketentuan Terkait

Untuk mengelola proyek infrastruktur, terutama menghadapi akhir tahun, penting untuk mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa serta ketentuan terkait administrasi dan pelaporan. Selain itu, pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga memberikan arahan teknis terkait pengelolaan proyek, termasuk tata cara penyesuaian anggaran dan pelaporan akhir tahun.

Regulasi tambahan mencakup standar kualitas yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan peraturan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mencakup spesifikasi teknis dan kualitas untuk berbagai jenis proyek infrastruktur. Sebagai contoh, Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, yang menyediakan panduan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek konstruksi, termasuk penyelesaian akhir dan penutupan kontrak.

Selain itu perlu diperhatikan juga regulasi administratif dan legal seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur ketentuan-ketentuan administratif dan prosedur dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

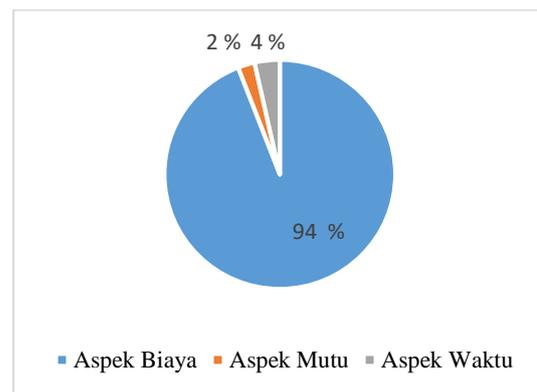
Di samping itu, Kementerian Keuangan juga menerbitkan peraturan khusus terkait langkah akhir tahun setiap menjelang akhir tahun anggaran berkenaan,

misalnya terakhir dengan PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 dan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek proyek, dari pengadaan hingga penyelesaian akhir, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang berlaku.

Aspek Manajemen Proyek dan Permasalahan yang Ditemukan

Menjelang akhir tahun anggaran, proyek infrastruktur sering kali menghadapi tantangan tambahan yang mempengaruhi mutu, biaya, dan waktu. Hasil Pemeriksaan BPK (2023) pada Belanja Modal Kementerian PUPR TA 2022 menunjukkan permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan jika diklasifikasikan pada tiga aspek tersebut, mayoritas terjadi pada aspek biaya, sebagaimana tertera pada gambar 1.



Gambar 1. Permasalahan pada Tiga Aspek Manajemen Proyek: Biaya, Mutu dan Waktu berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan studi literatur dan wawancara yang dilakukan, secara lebih rinci, kondisi menjelang akhir tahun pada tiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Mutu

Mutu adalah salah satu aspek terpenting dalam manajemen proyek infrastruktur. Menjaga standar kualitas sepanjang siklus proyek, terutama menjelang akhir tahun, adalah tantangan yang signifikan. Tekanan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu sering kali dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir, menyebabkan kebutuhan untuk kontrol kualitas yang ketat dan inspeksi rutin. Kualitas material dan teknik konstruksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menghindari perbaikan tambahan yang bisa meningkatkan biaya dan waktu penyelesaian.

2) Biaya

Pengelolaan biaya merupakan aspek kritis lainnya dalam proyek infrastruktur. Pembengkakan biaya sering kali menjadi masalah utama, terutama menjelang akhir tahun anggaran ketika perubahan ruang lingkup atau penundaan pengadaan material dapat mempengaruhi anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pengelolaan biaya memerlukan estimasi yang akurat, pengendalian anggaran yang ketat, dan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan rencana.

3) Waktu

Manajemen waktu adalah faktor kunci yang mempengaruhi keseluruhan keberhasilan proyek. Keterlambatan sering kali terjadi menjelang akhir tahun anggaran karena berbagai faktor seperti kendala administrasi, cuaca ekstrem, dan kekurangan tenaga kerja. Penting untuk memiliki rencana penjadwalan yang realistis dan strategi mitigasi risiko untuk menangani potensi keterlambatan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Permasalahan yang Ditemukan pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur pada Akhir Tahun Anggaran

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dan pelanggaran yang sering terjadi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pada akhir tahun. Permasalahan utama dari studi ini, berdasarkan data dan temuan dari BPK pada hasil pemeriksaan pada akun Belanja Modal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh tim pemeriksa di tahun 2023. Secara garis besar permasalahan yang ditemukan pada Paket Pekerjaan yang belum selesai dan telah selesai/seharusnya selesai pada TA 2022 sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Rincian Permasalahan atas Belanja Modal Kementerian PUPR pada Paket Pekerjaan TA 2022

No	Uraian	Jumlah Satker	Jumlah Paket Pekerjaan
Permasalahan atas Belanja Modal TA 2022 pada Paket Pekerjaan yang Belum Selesai Tahun 2022			
1	Pekerjaan tambah yang masih menggunakan harga satuan timpang	2	2
2	Kekurangan volume Pekerjaan	10	14
3	Ketidaksesuaian Realisasi dengan Ketentuan Pembayaran	1	1
4	Ketidaksesuaian Perhitungan Penyusunan Harga Satuan	1	1
Jumlah		14	18

No	Uraian	Jumlah Satker	Jumlah Paket Pekerjaan
Permasalahan atas Belanja Modal TA 2022 pada Paket Pekerjaan yang Telah Selesai/Seharusnya Selesai Tahun 2022			
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	34	49
2	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	2	2
3	Item Pekerjaan tidak dapat Dibayarkan Terpisah	2	2
4	Kesalahan/Ketidaktepatan Perhitungan Penyusunan Harga Satuan	8	9
5	Pekerjaan Tambah yang Masih Menggunakan Harga Satuan Timpang	2	2
6	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Ditarik dan Disetorkan ke Kas Negara	3	3
Jumlah		51	67

Analisa lebih lanjut dan wawancara dengan professional terkait menunjukkan secara permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan proyek infrastruktur menjelang berakhirnya tahun anggaran, meliputi:

1) Ketidaksesuaian dalam Penggunaan Anggaran dan Progress Pekerjaan

Temuan BPK menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran yang tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada realisasi pembayaran pekerjaan konstruksi yang melebihi persentase pekerjaan terpasang atau terdapat kekurangan volume pekerjaan, item pekerjaan yang seharusnya tidak dibayarkan, atau kesalahan dalam perhitungan harga satuan. Hal ini mengarah pada potensi pemborosan anggaran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan pengadaan.

Kondisi lainnya yang ditemukan adalah laporan progress pekerjaan telah didesain 100% selesai di pertengahan bulan Desember atau mendekati batas akhir penyampaian pengajuan pembayaran secara LS ke KPPN, walaupun kemajuan pekerjaan di lapangan masih jauh dari 100%. Ditambah lagi, atas sisa pekerjaan yang selanjutnya dijamin, PPK kadang kala tidak melakukan pengujian atau pemeriksaan fisik bersama di lapangan untuk memastikan besaran yang dijamin sudah sesuai dengan kewanjutan pekerjaan.

Ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran dan progress pekerjaan pada akhir tahun sering kali terjadi akibat kurangnya pengawasan dan dokumentasi yang memadai. Temuan ini menunjukkan perlunya sistem pemantauan anggaran yang lebih transparan dan akurat.

Penggunaan teknologi berbasis sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi pelaporan dan pemantauan pengeluaran secara *real-time*, mengurangi kemungkinan pemborosan dan ketidakpatuhan.

2) Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan

BPK mengungkapkan bahwa beberapa proyek mengalami penundaan yang signifikan tanpa adanya penyesuaian jadwal yang tepat atau perencanaan mitigasi risiko yang memadai. Keterlambatan ini sering kali berdampak pada anggaran dan kualitas pekerjaan akhir. Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa PPK seringkali tidak memperhitungkan denda keterlambatan tersebut.

Kondisi keterlambatan ini seringkali terjadi karena keterlambatan dalam memulai pelaksanaan pengadaan, seperti dalam pemilihan konsultan perencana yang selanjutnya akan berdampak pada output dari pengadaan jasa konsultan perencana tersebut yang akan digunakan dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Selanjutnya, kondisi ini juga akan membuat pemilihan penyedia jasa konstruksi (kontraktor) juga terlambat dan pekerjaan terlambat dimulai.

Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan proyek infrastruktur di akhir tahun juga dapat dikarenakan proyek yang tidak mengantisipasi potensi masalah seperti cuaca buruk atau keterlambatan pasokan material. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan rencana kontinjensi yang komprehensif dan meningkatkan frekuensi inspeksi lapangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini.

3) Kurangnya Kepatuhan terhadap Regulasi

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketidaklengkapan dalam dokumentasi izin dan sertifikat, serta ketidakpatuhan terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan, maupun yang secara khusus terkait dengan langkah yang harus dilakukan oleh pekerjaan konstruksi yang belum selesai pada akhir tahun anggaran

Analisa terhadap PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, menunjukkan bahwa terdapat kesempatan untuk dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya jika memenuhi ketentuan, antara lain: pekerjaan tersebut dari suatu kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan dan termasuk dalam kriteria kontraktahunan atau kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak. Selanjutnya, dalam hal pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan konstruksi, pekerjaan dimaksud harus telah terselesaikan paling sedikit 50% dari nilai kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, jika pekerjaan tersebut merupakan

bagian dari proyek strategis nasional (Gambar 2) maka dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut.



Gambar 2. Daftar Proyek Strategis Nasional (Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2023)

Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi terutama terkait perlakuan pada akhir tahun untuk proyek konstruksi yang belum diselesaikan, misalnya pada perpanjangan jaminan pelaksanaan, adanya jaminan pembayaran serta batas waktu pemberitahuan ke KPPN yang harus dipatuhi jika pelaksanaan pekerjaan akan diteruskan ke tahun anggaran berikutnya.

Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi ini menyoroti perlunya pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi semua pihak terkait dalam proyek. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang berlaku, diharapkan semua anggota tim dapat mematuhi standar yang ditetapkan. Verifikasi dokumen administratif dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru harus dilakukan secara proaktif untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi sebelum akhir tahun.

4) Masalah dalam Pengadaan dan Penegakan Kontrak

Temuan BPK mengungkapkan masalah dalam pengadaan dan penegakan kontrak sering kali berakar pada kurangnya transparansi dan mekanisme control/pengawasan yang lemah. Untuk mengatasi hal ini, proses pengadaan harus dilakukan dengan transparansi penuh dan harus ada audit independen untuk memastikan bahwa semua praktik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan kontrak juga memerlukan mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semua kewajiban kontrak dipenuhi dan sanksi diterapkan jika terjadi pelanggaran.

5) Pengawasan dan Mitigasi Risiko yang Tidak Memadai

Temuan BPK mengidentifikasi bahwa banyak proyek tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kurangnya langkah

mitigasi yang efektif dapat memperburuk masalah yang timbul dan mengganggu keberhasilan proyek.

Kurangnya pengawasan risiko dan langkah mitigasi yang memadai menunjukkan bahwa banyak proyek tidak memiliki rencana risiko yang komprehensif. Pengembangan rencana mitigasi risiko yang terperinci dan penerapan langkah-langkah proaktif sangat penting untuk mengatasi potensi masalah dan menjaga kelancaran proyek. Penerapan metode manajemen risiko yang canggih akan membantu dalam identifikasi dan penanganan masalah secara efektif sebelum menjadi isu yang lebih besar.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan pengelolaan proyek infrastruktur pada akhir tahun, perlu adanya implementasi langkah-langkah yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi, pelatihan regulasi, dan pengawasan risiko yang lebih baik. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan proyek infrastruktur dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif, meminimalkan pelanggaran ketentuan, dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan.

KESIMPULAN

Akhir tahun dalam proyek infrastruktur merupakan fase kritis yang memerlukan perhatian mendalam dan pengelolaan yang hati-hati untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan waktu, anggaran, dan standar kualitas yang diharapkan. Dalam paper ini, telah dibahas langkah-langkah yang harus diambil oleh Insinyur Teknik Sipil untuk menangani akhir tahun, termasuk evaluasi progres pekerjaan, pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan mitigasi risiko.

Selain itu, evaluasi progres pekerjaan perlu dilakukan yang mencakup verifikasi fisik dan administratif untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengelolaan anggaran melibatkan audit yang cermat terhadap pengeluaran dan penyelesaian kontrak untuk memastikan efisiensi penggunaan dana. Kepatuhan terhadap regulasi memerlukan verifikasi dokumen dan penyesuaian terhadap peraturan terbaru. Sementara mitigasi risiko melibatkan identifikasi dan penanganan potensi masalah yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek infrastruktur pada akhir tahun, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku secara konsisten. Penegakan ketentuan dan regulasi yang ketat, serta pelaksanaan audit dan pengawasan yang cermat, adalah rekomendasi dan saran yang dapat diberikan pada

penelitian ini karena sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa proyek infrastruktur diselesaikan dengan sukses. Dengan mengikuti pedoman ini dan belajar dari temuan BPK, diharapkan dapat tercapai pengelolaan proyek yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan-rekan kerja dan Bapak/Ibu di Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan informasi untuk melengkapinya paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022
- BPK RI. (2021). Seri Panduan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. BPK RI.
- Gillespie, J. (2018). Project Management for Infrastructure Projects. New York: Springer.
- Kostka, Genia and Jobst Fiedler (2016). Large Infrastructure Projects in Germany Between Ambition and Realities.
- Hadi, S. (2017). Manajemen Waktu dalam Proyek Konstruksi: Teori dan Aplikasi Praktis. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2023) dalam Theodora, Agnes (2023) Nasib Kelanjutan Proyek Strategis Nasional Segera Diputuskan, Kompas <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/13/nasib-kelanjutan-proyek-strategis-nasional-segera-diputuskan>>
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

- Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Jasa Konstruksi
- PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2023
- PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.
- Sutrisno, S. (2016). Manajemen Kualitas Proyek Konstruksi: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yohanes, A. (2015). Manajemen Biaya Konstruksi: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Penerbit Andi.